



Dinas Sosial Perketat Pemakaian KMS

Banyak Disalahgunakan di Sektor Pendidikan

YOGYAKARTA – Dinas Sosial Kota Yogyakarta berencana memperketat pemakaian Kartu Menuju Sehat (KMS). Kartu yang diperuntukkan bagi kalangan warga berekonomi menengah ke bawah itu kerap disalahgunakan terutama menyangkut akses layanan pendidikan.

Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Hadi Muchtar mengakui, pihaknya menerima laporan dari masyarakat adanya penyalahgunaan KMS saat pendaftaran masuk sekolah negeri di Kota Yogyakarta.

Selama ini, ada calon siswa asal luar kota namun masih berstatus kerabat dengan pemegang KMS, mendompleng fasilitas KMS untuk mendaftar di sekolah negeri yang memiliki kuota khusus pemegang KMS.

"Kami tengah kaji formulasi agar kasus serupa tak terjadi lagi. Jadi pemakaian KMS untuk layanan pendidikan kami perketat agar benar-benar menjamin hak warga miskin asli Kota Yogyakarta," jelas Hadi, kemarin.

Aturan untuk memperketat pemanfaatan KMS di sektor pendidikan akan dituangkan dalam peraturan wali kota. Dinas Sosial juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta.

"Jangan sampai fasilitas ini justru dinikmati oleh warga luar

kota. Nantinya akan ada persyaratan ketat seperti penunjukkan akta kelahiran anak dan bapaknya sehingga benar-benar runut," katanya.

Sementara itu, berapa jumlah warga kategori miskin Kota Yogyakarta yang berhak menerima KMS tahun 2017 akhirnya terverifikasi. Pemkot Yogyakarta menetapkan daftar penerima KMS sebanyak 18.651 kepala keluarga (KK), turun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 18.730 KK.

Rincian penerima KMS tahun ini terdiri dari hasil verifikasi ulang penerima KMS

tahun lalu sebanyak 15.593 KK ditambah hasil verifikasi daftar usulan baru sebanyak 3.058 KK. "Jika dilihat maka penerima KMS tahun ini berkurang 79 KK dibanding tahun lalu," ungkap Hadi.

KMS yang dibagikan kepada warga miskin untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial tersebut terbagi atas tiga golongan, yaitu KMS 1 yang digunakan oleh fakir miskin sebanyak 17 KK, KMS 2 atau golongan miskin sebanyak 5.308 KK, dan KMS 3 yang digunakan oleh warga rentan miskin sebanyak

13.326 KK.

Dinas Sosial segera mencetak kartu dan membagikannya kepada warga penerima dimulai dari kecamatan yang berada di sisi barat Kota Yogyakarta.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto sepakat adanya kebijakan memperketat pemanfaatan KMS di layanan pendidikan. Pasalnya, berdasar hasil kunjungan Komisi D ke sekolah-sekolah, banyak masukan dari kepala sekolah setempat banyak KMS yang salah sasaran.

Hal itu dibuktikan dengan adanya siswa yang mendapat KMS namun ternyata banyak yang diantar pakai mobil. "Bahkan ibu-ibu yang mengantar pakai perhiasan emas. Kesannya seperti toko emas *mlaku* (berjalan)," kata Fokki.

Meski demikian, dia berharap upaya memperketat pemakaian KMS nantinya tidak mengganggu hak-hak warga miskin pemegang KMS. "Termasuk proseduralnya, jangan justru membuat bingung warga yang akan mengakses layanan yang dijamin KMS," imbuhnya.

ristu hanaf Jak Lanjut

☐ Nonatif

☐ Amat Segera

☐ Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005